



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (BPP)



Badan Pengarah Papua
Provinsi Papua

Laporan Bulan April 2026

Ringkasan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua sepanjang April 2026 melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam empat klaster utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Kegiatan ini difokuskan pada konektivitas kerja BP3OKP/BPP. Secara umum, kegiatan bulan ini menunjukkan adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi program-program prioritas daerah.

Rekomendasi utama dari seluruh kegiatan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan menuju visi Papua Emas 2041.










1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) / Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:

Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Rapat Pembahasan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 antara Anggota dan Pokja BPP/BP3OKP bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan bertempat di Gedung Sutan Takdir Alisyahbana, Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Rabu - Jumat 1 s.d. 3 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Membahas Konsep Kongres Bahasa Daerah Percepatan pembuatan SK Panitia 	<ul style="list-style-type: none"> Konsep diterima dan akan disesuaikan dengan Panitia yang terbentuk SK sudah masuk Bagian Hukum Kemendikdasmen (Proses Finalisasi) 	
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat terkait Pembangunan Markas Batalyon In fantri Pembangunan 858/MSB di Aidoram Kainkain Karkara Byak (KKB) Sorido Biak Kabupaten Biak Numfor	Selasa – Kamis 7 s.d. 9 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan memetakan akar permasalahan sengketa tanah adat terkait pembangunan Markas Yonif 858/TP di Biak Timur. Menyerap aspirasi masyarakat adat (8 marga) serta memperoleh perspektif dari TNI, BPN, dan Pemerintah Daerah. Mendorong penyelesaian sengketa secara persuasif, legal, dan 	<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan adanya perbedaan signifikan luas lahan: 56 Ha (Pemda) vs 71,24 Ha (BPN) serta klaim milik bersama 8 marga. Terindikasi pelepasan tanah awal dilakukan sepihak dan belum memenuhi aspek legalitas adat. Status lahan merupakan Hutan Produksi, sehingga memerlukan proses pelepasan kawasan dari KLHK sebelum sertifikasi. Proses sertifikasi belum dapat dilanjutkan karena lahan belum clear and clean (masih sengketa). Semua pihak (BPP, TNI, BPN, Pemda) sepakat perlunya pendekatan dialogis dan 	 



			berkeadilan tanpa menghambat proyek strategis nasional.	verifikasi ulang data serta batas lahan.	
3.	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan di Papua serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua bekerja sama dengan Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 643/Wns.	Kamis 9 April 2026	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan Tusi SHEKMendorong penguatan literasi di wilayah perbatasan	<ul style="list-style-type: none">Rencana kegiatan Bersama di tahun 2026	
4.	Menghadiri Malam Penganugerahan Duta Bahasa Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.	Sabtu 11 April 2026	Melihat secara langsung pembinaan Balai Bahasa dalam literasi	Kegiatan berlangsung baik	



5.	Pengembangan Layanan Leuungan di daerah, Dukungan terhadap pemerintahan daerah dan Peluang Kerja sama bersama Bank Negara Indonesia	Senin 13 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat peran BPP dalam sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan guna mendorong kemandirian fiskal di Papua.• Mengidentifikasi dan mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dalam mendukung program prioritas dan pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi peluang kerja sama dengan perbankan (BNI) dalam program Peremajaan Sawit Rakyat melalui skema penyaluran dana berbasis koperasi.• Program peremajaan sawit (± 12.000 ha; tahap awal ± 3.000 ha) menjadi prioritas untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.• Ditemukan kendala utama: rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses pembiayaan dan sarana, serta belum optimalnya tata kelola dan pembinaan oleh Pemda.• Disepakati perlunya pendekatan pembiayaan terintegrasi melalui pendampingan, literasi keuangan, dan digitalisasi.• Direncanakan pilot project pada sektor sawit, perikanan, dan peternakan.	
6.	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPC)	Senin 13 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Komite Paralimpik Nasional (NPC) Papua, khususnya terkait pendanaan, fasilitas, dan dukungan pemerintah daerah.• Mendorong peningkatan perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi berbagai permasalahan utama, yaitu minimnya dukungan anggaran, birokrasi yang berbelit, kurangnya apresiasi terhadap atlet, keterbatasan infrastruktur, serta adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.• Ditemukan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap NPC masih belum optimal dan belum berkeadilan dibandingkan cabang olahraga lainnya.• Disepakati perlunya pemisahan penanganan isu pendidikan	





			<p>sebagai bagian dari pembangunan manusia Papua.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperkuat peran BPP sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator koordinasi lintas sektor dalam mendukung olahraga disabilitas.• Mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam kebijakan Otsus, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.	<p>(SLB) dan keolahragaan (NPC) agar lebih fokus dan tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diusulkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai forum strategis untuk membahas solusi kebijakan, pendanaan, dan penguatan kelembagaan NPC. BPP berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut permasalahan.	
7.	Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Papua 2026 diselenggarakan oleh BKKBN	Selasa 14 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Mensinkronkan kebijakan dan program Bangga Kencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Papua.• Mengevaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan di lapangan.• Mendorong percepatan pencapaian program prioritas, khususnya	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi perlunya transformasi pendekatan dari program administratif menjadi intervensi berbasis keluarga dan data akurat.• Ditegaskan pentingnya integrasi lintas sektor (OPD, BKKBN, Kesehatan, Dukcapil, dll) dalam pelaksanaan program.• Ditemukan tantangan utama: data belum terintegrasi, akses wilayah sulit, serta lemahnya koordinasi lintas OPD.• Menguatnya peran BPP sebagai control tower dalam mengarahkan, mengawal, dan memastikan program tepat sasaran	 <p>The image shows a group of officials standing on a stage during the 'Rakorda 2026' event. The backdrop features the event title 'RAKORDA 2026' and 'RAPAT KOORDINASI DAERAH PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI PAPUA TAHUN 2026'. Below the title, it reads 'TRANSFORMASI KEMENDUKUNGAN MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN RI INDONESIA EMAS 2045'. Logos of various government entities are visible at the top of the backdrop.</p>





			<p>penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, dan pengendalian penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.• Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program secara efektif dan berkelanjutan.		
--	--	--	--	--	--





8.	Pertemuan Bpp Provinsi Papua dan Walikota Jayapura.	Selasa 14 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan dan Pokja Papua Sehat telah memaparkan secara garis besar rencana pelaksanaan Kongres Bahasa yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2026.• Walikota dan Wakil Walikota Jayapura menyambut baik rencana kegiatan tersebut serta menilai pentingnya pelaksanaan Kongres Bahasa dalam mendukung pelestarian budaya dan penguatan literasi di Kota Jayapura.	<ul style="list-style-type: none">• Walikota Jayapura menyatakan kesediaannya untuk hadir secara langsung sekaligus membuka kegiatan dan memberikan arahan kepada peserta kongres.• Disepakati perlunya kolaborasi dengan dinas terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.	
9.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga dalam Menyikapi Dinamika Sosial dan Kepercayaan Publik di Papua. BPP bersama MRP, DPRP dan Kesbangpol.	Rabu 15 April 2026	Memahami kerja masing-masing badan untuk dapat berkoordinasi sehingga tercipta Kerjasama yang menguntungkan bagi Rakyat dan Tanah Papua.	Hasil bersama yang dicapai ialah, BPP menegaskan mandat SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), kemudian MRP mendesain kerangka dan keberpihakan afirmatif dengan finishing regulasi dari DPR serta penilaian dampak oleh kesbangpol.	





10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan substansi materi narasumber 2. Sinkronisasi program BPP dan BPJS Kesehatan (Program JKN di Papua 3. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan BPJS tema “Transsformasi dan Kolaborasi Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta dan Akses Layanan Berkelanjutan. 	Rabu 15 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Mensinkronkan program BPP dengan BPJS Kesehatan Cabang, khususnya pelaksanaan Program JKN di Papua. • Menyelaraskan substansi materi kegiatan serta memperkuat koordinasi pelaksanaan program. • Mendorong integrasi kebijakan dan percepatan program prioritas kesehatan berbasis data yang akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disepakati perlunya transformasi pendekatan dari data ke aksi berbasis data akurat. • Ditegaskan bahwa PJKP 2025–2029 menjadi instrumen utama integrasi lintas sektor. • Teridentifikasi permasalahan utama: data tidak akurat, akses wilayah sulit, beban kader tinggi, dan lemahnya integrasi OPD. • Menguatnya peran BPP sebagai pengarah kebijakan, pengendali program, integrator lintas sektor, dan akselerator program prioritas. • Disepakati langkah strategis: konsolidasi data, penguatan tata kelola, percepatan intervensi lapangan, reformulasi Otsus, serta penguatan monitoring berbasis outcome 	
11.	Rapat bersama PERADI terkait dukungan program kerja dan pendampingan hukum dalam rangka pembangunan manusia, tata kelola dana Otonomi Khusus, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.	Kamis 16 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sinergi antara BPP dan PERADI dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. • Memperkuat pandangan hukum, pengawasan dana Otsus, serta perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP). • Mendorong perbaikan tata kelola program pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasi kelemahan tata kelola dana Otsus, termasuk rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan ketidaktepatan penggunaan anggaran. • Ditemukan berbagai persoalan pada kampung, beasiswa, pendidikan, dan kesehatan yang belum berdampak optimal bagi OAP. • Disepakati pentingnya pemisahan sumber dana dan penguatan sistem digital pengawasan. • PERADI diposisikan sebagai mitra strategis BPP dalam pendampingan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. 	



			manusia, pendidikan, dan kesehatan, dan kesejahteraan OAP.	<ul style="list-style-type: none">• Disepakati rencana tindak lanjut berupa penyusunan MoU dan penguatan sistem pengawasan terintegrasi.	
12.	Menjadi Narasumber di Seminar Jurusan Hukum Universitas Cenderawasih dengan tema "Refleksi Otonomi Khusus Papua"	Jumat 17 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Menjadi narasumber• Sosialisasi BP3OKP	Antusiasme Mahasiswa sangat baik dalam memberikan pertanyaan tentang OTSUS PAPUA	
13.	Menjadi Narasumber dalam kegiatan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura : tema "Transformasi dan Kolaborasi, Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta, dan Akses Layanan Kesehatan Berkelanjutan".	Jumat 17 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Menghadiri kegiatan BPJS Kesehatan Cabang dalam rangka mendukung pelaksanaan Program JKN di Papua.• Memperoleh informasi dan pemahaman terkait transformasi dan kolaborasi kepesertaan JKN.	<ul style="list-style-type: none">• Diperolehnya gambaran mengenai arah kebijakan dan strategi penguatan kepesertaan JKN di Papua.• Teridentifikasinya pentingnya peran pemerintah daerah, kemandirian peserta, serta peningkatan akses layanan kesehatan.	



14.	Menjadi Narasumber pada Dialog Papua 60 Menit tema Arah baru papua, Mewujudkan Papua cerdas, sehat, produktif dan aman TVRI Papua.	Rabu 22 April 2026	Bentuk sosialisasi BP3OKP terhadap TuSi dan bagaimana melihat lalu memberikan tanggapan tentang kondisi Papua sekarang	Kegiatan berlangsung baik dan akan direncanakan untuk dilakukan dialog terkait “ 5 TAHUN PERJALANAN OTSUS PAPUA”	
15.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	Kamis 30 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027.• Memperoleh informasi terkait arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan perencanaan program Otsus di Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Diperolehnya gambaran mengenai prioritas pembangunan daerah dan fokus program Otsus Tahun 2027.• Teridentifikasinya kebutuhan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan Otsus.	



Rekomendasi Kegiatan Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Rapat Pembahasan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 antara Anggota dan Pokja BPP/BP3OKP bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan bertempat di Gedung Sutan Takdir Alisyahbana, Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Surat Permohonan Dukungan dari Badan Bahasa ke 6 Gubernur se Tanah Papua
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat terkait Pembangunan Markas Batalyon In fantri Pembangunan 858/MSB di Aidoram Kainkain Karkara Byak (KKB) Sorido Biak Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sinkronisasi data luas dan status lahan antar pihak.• Melaksanakan pelepasan hak ulayat ulang yang sah dengan melibatkan seluruh 8 marga.• Mengadakan peninjauan lapangan bersama (tata batas/patok) untuk memastikan batas dan luas lahan.• Melakukan koordinasi lintas instansi (BPN Provinsi, KLHK, Pemda, TNI).• Menjamin pembangunan tidak mengganggu lingkungan dan sumber air Kali Ruar.• Meningkatkan komunikasi dan koordinasi TNI dengan masyarakat adat dan Pemda.
3.	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan di Papua serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua bekerja sama dengan Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 643/Wns.	Buat sebuah kegiatan peningkatan literasi Bersama di Wilayah perbatasan RI-PNG
4.	Menghadiri Malam Penganugerahan Duta Bahasa Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.	Tetap dilanjutkan dan di tingkatkan
5.	Pengembangan Layanan Leuangan di daerah, Dukungan terhadap pemerintahan daerah dan Peluang Kerja sama bersama Bank Negara Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan audiensi antara BPP dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menyusun skema kerja sama sebagai bank pelaksana program Peremajaan Sawit Rakyat.• Menyusun dan menandatangani MoU/PKS antara BPP, BNI, koperasi petani, dan pihak pabrik kelapa sawit (PKS) terkait mekanisme penyaluran dana replanting.• Menyusun Proposal kunjungan lapangan (on-site visit) ke lokasi peremajaan sawit di Kabupaten Keerom untuk verifikasi kesiapan kelompok tani, koperasi, dan lahan.• Membentuk tim pendamping terpadu (BPP, perbankan, dan OPD terkait) untuk memberikan pendampingan langsung kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM.



		<ul style="list-style-type: none">• Menyusun pelatihan literasi keuangan dan inkubator usaha bagi masyarakat asli Papua bekerja sama dengan BNI, dengan fokus pada calon penerima pembiayaan.• Melaksanakan pilot project terintegrasi di wilayah Keerom, Timika, dan Kota Jayapura pada sektor:<ul style="list-style-type: none">• Peremajaan sawit• Perikanan• Peternakan• Memfasilitasi penyediaan sarana pendukung perikanan, seperti cold storage dan akses rantai distribusi, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra swasta.• Mendorong implementasi sistem digitalisasi keuangan koperasi dan kelompok usaha, bekerja sama dengan BNI, untuk meningkatkan transparansi dan akses pembiayaan.
6.	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran yang adil dan berkelanjutan bagi pembinaan olahraga disabilitas melalui mekanisme hibah yang transparan.• Menyederhanakan mekanisme birokrasi pengajuan anggaran agar tidak menghambat operasional• Memastikan penyediaan fasilitas olahraga yang layak dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.• Mendorong pemberian apresiasi dan penghargaan kepada atlet disabilitas yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.• Mendukung pelaksanaan Muswil NPC sebagai forum resmi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat dan terintegrasi lintas sektor.• Mengintegrasikan isu disabilitas dalam kebijakan Otsus, termasuk pada sektor pendidikan (penambahan SLB), kesehatan, dan sosial.• BPP perlu melakukan koordinasi dan penyampaian rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) guna memastikan adanya tindak lanjut konkret.
7.	Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Papua 2026 diselenggarakan oleh BKKBN	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan integrasi dan verifikasi data keluarga (by name by address) sebagai dasar kebijakan dan intervensi.• Mendorong sinkronisasi program Bangga Kencana dengan Otsus, DAK, dan program nasional dalam satu kerangka terpadu.



		<ul style="list-style-type: none"> • Mengakselerasi intervensi langsung di tingkat kampung/keluarga, khususnya di wilayah dengan stunting tinggi dan akses terbatas. • Memperkuat koordinasi lintas OPD dengan dukungan Sekda sebagai leading sector operasional. • Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome (dampak), bukan hanya output kegiatan. • Mengarahkan program agar lebih kontekstual berbasis wilayah adat dan kearifan lokal Orang Asli Papua (OAP).
8.	Pertemuan Bpp Provinsi Papua dan Walikota Jayapura.	Penyampaian Surat resmi dari Badan Bahasa
9.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga dalam Menyikapi Dinamika Sosial dan Kepercayaan Publik di Papua. BPP bersama MRP, DPRP dan Kesbangpol.	<ul style="list-style-type: none"> • Rumuskan strategi komunikasi publik terpadu BPP–DPRP–MRP (juru bicara, pesan kunci, kanal, SOP krisis) untuk meredam blunder dan narasi pembubaran. • Formalkan struktur koordinasi regulasi lintas lembaga (alur usulan, tenggat, PIC) untuk mencegah tumpang tindih; tetapkan peran MRP dalam inisiatif naskah vs advokasi.
10.	<p>4. Pembahasan substansi materi narasumber</p> <p>5. Sinkronisasi program BPP dan BPJS Kesehatan (Program JKN di Papua)</p> <p>6. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan BPJS tema “Transformasi dan Kolaborasi Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta dan Akses Layanan Berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan dan integrasi data (by name by address) sebagai dasar pengambilan kebijakan. • Mengoptimalkan sinergi lintas OPD dan integrasi program (Otsus, DAK, dan program nasional). • Memperkuat pelaksanaan program prioritas (MBG, stunting, Bangga Kencana) berbasis keluarga dan wilayah adat. • Mendorong intervensi langsung di lapangan, khususnya pada wilayah dengan akses sulit dan angka stunting tinggi. • Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome melalui dashboard terintegrasi. • Mengarahkan pemanfaatan dana Otsus agar lebih berdampak langsung pada keluarga OAP.
11.	Rapat bersama PERADI terkait dukungan program kerja dan pendampingan hukum dalam rangka pembangunan manusia, tata kelola dana Otonomi Khusus, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan segera menindaklanjuti MoU BPP–PERADI yang komprehensif dan operasional. • Membentuk Tim Bersama untuk penanganan cepat persoalan hukum terkait dana Otsus dan masyarakat adat. • Mengembangkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga tingkat kampung. • Melakukan audit, verifikasi data (beasiswa, OAP), dan penguatan pengawasan dana Otsus. • Mendorong literasi hukum bagi OAP serta perlindungan sektor produktif lokal.



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

12.	Menjadi Narasumber di Seminar Jurusan Hukum Universitas Cenderawasih dengan tema "Refleksi Otonomi Khusus Papua"	Lebih banyak kegiatan seperti ini atau menjadi narasumber pada kuliah umum agar memberikan wawasan bagi mahasiswa
13.	Menjadi Narasumber dalam kegiatan BPJS Cabang Jayapura : tema "Transformasi dan Kolaborasi, Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta, dan Akses Layanan Kesehatan Berkelanjutan".	<ul style="list-style-type: none">• Perlu meningkatkan koordinasi lebih lanjut dan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.• Mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.• Mendukung upaya perluasan kepesertaan JKN secara berkelanjutan.
14.	Menjadi Narasumber pada Dialog Papua 60 Menit_thema Arah baru papua, Mewujudkan Papua cerdas, sehat, produktif dan aman TVRI Papua.	Koordinasi dengan sekretariat BPP untuk mempersiapkan rencana kegiatan Publikasi/ Dokumentasi yang lebih masive
15.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong sinkronisasi perencanaan RKPD dengan program Otsus agar lebih tepat sasaran.• Memperkuat koordinasi antar OPD dan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan program.• Mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.



KESIMPULAN

Selama bulan April 2026, Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua bersama Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Namun, masih terdapat tantangan utama berupa belum optimalnya tata kelola dan pemanfaatan dana Otsus, lemahnya integrasi data, serta koordinasi lintas OPD yang belum efektif.

Pada sektor ekonomi, teridentifikasi peluang strategis melalui pengembangan program Peremajaan Sawit Rakyat, perikanan, dan peternakan, yang didukung oleh potensi kolaborasi dengan sektor perbankan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa tanah adat, penguatan perlindungan hukum, serta perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menjadi isu penting yang memerlukan intervensi berkelanjutan.




Dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan bulan April 2026, BPP Provinsi Papua akan melaksanakan focus perencanaan kedepan, antara lain:

1. Melaksanakan audiensi perencanaan bersama BNI untuk mendukung pembiayaan program Peremajaan Sawit Rakyat dan pengembangan sektor produktif lainnya.
2. Diskusi lebih lanjut dengan Peradi untuk penguatan dan pengawasan hukum dana Otsus.
3. Melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data pada lokasi prioritas (Keerom, Biak, dan wilayah lainnya), termasuk penyelesaian sengketa tanah adat dan kesiapan program ekonomi masyarakat.
4. Membentuk tim pendamping terpadu lintas sektor untuk memperkuat literasi keuangan, pembinaan UMKM, serta intervensi langsung pada sektor perikanan, peternakan, dan sawit.
5. Memperkuat koordinasi lintas lembaga (MRP, DPRP, Pemda) serta mendorong perbaikan tata kelola dan pengawasan dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua.


Secara keseluruhan, diperlukan percepatan langkah implementatif melalui kolaborasi multipihak, penguatan tata kelola, serta intervensi berbasis kebutuhan riil masyarakat guna memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



Kelompok Kerja (POKJA) Papua POLHUKAM BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat terkait Pembangunan Markas Batalyon In fantri Pembangunan 858/MSB di Aidoram Kainkain Karkara Byak (KKB) Sorido Biak Kabupaten Biak Numfor	Selasa – Kamis 7 s.d. 9 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan memetakan akar permasalahan sengketa tanah adat terkait pembangunan Markas Yonif 858/TP di Biak Timur. Menyerap aspirasi masyarakat adat (8 marga) serta memperoleh perspektif dari TNI, BPN, dan Pemerintah Daerah. Mendorong penyelesaian sengketa secara persuasif, legal, dan berkeadilan tanpa menghambat proyek strategis nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan adanya perbedaan signifikan luas lahan: 56 Ha (Pemda) vs 71,24 Ha (BPN) serta klaim milik bersama 8 marga. Terindikasi pelepasan tanah awal dilakukan sepihak dan belum memenuhi aspek legalitas adat. Status lahan merupakan Hutan Produksi, sehingga memerlukan proses pelepasan kawasan dari KLHK sebelum sertifikasi. Proses sertifikasi belum dapat dilanjutkan karena lahan belum clear and clean (masih sengketa). Semua pihak (BPP, TNI, BPN, Pemda) sepakat perlunya pendekatan dialogis dan verifikasi ulang data serta batas lahan. 	 
2.	Bertemu Walikota Jayapura dalam rangka Audensi dilakukan di ruang kerja Pa walikota Jayapura dan didampingi oleh Wakil Walikota	Selasa 14 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Tim telah memaparkan secara garis besar rencana pelaksanaan Kongres Bahasa yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2026. Respons Pimpinan: Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota menyambut baik 	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Walikota menyatakan bersedia hadir secara langsung untuk membuka acara dan memberikan arahan kepada seluruh peserta kongres. kolaborasi dengan dinas terkait 	



			<p>inisiatif ini dan menilai kegiatan tersebut penting bagi pelestarian budaya dan pengembangan literasi di Kota Jayapura.</p>		
3.	<p>Rapat bersama PERADI terkait dukungan program kerja dan pendampingan hukum dalam rangka pembangunan manusia, tata kelola dana Otonomi Khusus, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.</p>	<p>Kamis 16 April 2026</p>	<ul style="list-style-type: none">• Membangun sinergi antara BPP dan PERADI dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.• Memperkuat pandangan hukum, pengawasan dana Otsus, serta perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP).• Mendorong perbaikan tata kelola program pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan OAP.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi kelemahan tata kelola dana Otsus, termasuk rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan ketidaktepatan penggunaan anggaran.• Ditemukan berbagai persoalan pada kampung, beasiswa, pendidikan, dan kesehatan yang belum berdampak optimal bagi OAP.• Disepakati pentingnya pemisahan sumber dana dan penguatan sistem digital pengawasan.• PERADI diposisikan sebagai mitra strategis BPP dalam pendampingan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi.• Disepakati rencana tindak lanjut berupa penyusunan MoU dan penguatan sistem pengawasan terintegrasi.	 



4.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	Kamis 30 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027.• Memperoleh informasi terkait arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan perencanaan program Otsus di Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Diperolehnya gambaran mengenai prioritas pembangunan daerah dan fokus program Otsus Tahun 2027.• Teridentifikasinya kebutuhan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan Otsus.	
----	---	------------------------	---	--	--



Rekomendasi Kelompok Kerja (POKJA) Papua POLHUKAM BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat terkait Pembangunan Markas Batalyon In fantri Pembangunan 858/MSB di Aidoram Kainkain Karkara Byak (KKB) Sorido Biak Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sinkronisasi data luas dan status lahan antar pihak.• Melaksanakan pelepasan hak ulayat ulang yang sah dengan melibatkan seluruh 8 marga.• Mengadakan peninjauan lapangan bersama (tata batas/patok) untuk memastikan batas dan luas lahan.• Melakukan koordinasi lintas instansi (BPN Provinsi, KLHK, Pemda, TNI).• Menjamin pembangunan tidak mengganggu lingkungan dan sumber air Kali Ruar.• Meningkatkan komunikasi dan koordinasi TNI dengan masyarakat adat dan Pemda.
2.	Pertemuan Bpp Provinsi Papua dan Walikota Jayapura.	-
3.	Rapat bersama PERADI terkait dukungan program kerja dan pendampingan hukum dalam rangka pembangunan manusia, tata kelola dana Otonomi Khusus, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan segera menindaklanjuti MoU BPP–PERADI yang komprehensif dan operasional.• Membentuk Tim Bersama untuk penanganan cepat persoalan hukum terkait dana Otsus dan masyarakat adat.• Mengembangkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga tingkat kampung.• Melakukan audit, verifikasi data (beasiswa, OAP), dan penguatan pengawasan dana Otsus.• Mendorong literasi hukum bagi OAP serta perlindungan sektor produktif lokal.
4.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong sinkronisasi perencanaan RKPD dengan program Otsus agar lebih tepat sasaran.• Memperkuat koordinasi antar OPD dan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan program.• Mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.



Pokja Papua POLHUKAM BPP/BP3OKP Provinsi Papua pada bulan April 2026 telah melaksanakan fungsi pengawalan, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya pada aspek politik, hukum, dan keamanan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) serta stabilitas pelaksanaan pembangunan. Melalui rangkaian koordinasi lintas pemangku kepentingan—meliputi pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, dan organisasi profesi hukum—Pokja mengidentifikasi sejumlah isu strategis, antara lain sengketa tanah adat pada proyek strategis nasional, lemahnya tata kelola dan pengawasan dana Otsus, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat.


Dalam konteks tersebut, Pokja Papua POLHUKAM menegaskan pentingnya penguatan pendekatan hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan berbasis pengakuan hak ulayat, tanpa menghambat agenda pembangunan nasional. Terkait sengketa lahan di Biak, Pokja saat ini tengah berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta menunggu pelaksanaan audiensi lanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinkronisasi data lintas instansi, validasi legalitas pelepasan hak adat, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme dialogis yang melibatkan seluruh pemilik hak ulayat.

Selain itu, Pokja Papua POLHUKAM juga memperkuat sinergi kelembagaan melalui koordinasi bersama MRP, DPRP, dan Kesbangpol, dalam rangka mengharmonisasikan tugas dan fungsi antar lembaga serta merespons dinamika kelembagaan di Papua. Upaya ini sekaligus mendorong pembentukan forum kolaboratif antar lembaga sebagai wadah strategis dalam mendukung implementasi agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, hasil koordinasi dengan PERADI menegaskan bahwa penguatan tata kelola dana Otsus memerlukan sistem pengawasan yang terintegrasi, transparan, serta didukung pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga implementasi program.


Sejalan dengan itu, Pokja Papua POLHUKAM memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan anggaran, tetapi juga oleh kepastian hukum, keadilan sosial, serta efektivitas perlindungan terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran BPP/BP3OKP untuk memastikan integrasi kebijakan pusat–daerah, penyelesaian konflik secara komprehensif, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.




Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Rapat Pembahasan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 antara Anggota dan Pokja BPP/BP3OKP bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan bertempat di Gedung Sutan Takdir Alisyahbana, Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Rabu - Jumat 1 s.d. 3 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Membahas Konsep Kongres Bahasa Daerah- Percepatan pembuatan SK Panitia	<ul style="list-style-type: none">- Konsep diterima dan akan disesuaikan dengan Panitia yang terbentuk- SK sudah masuk Bagian Hukum Kemendikdasmen (Proses Finalisasi)	
2.	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan di Papua serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh BPP dan Balai Bahasa Provinsi Papua bekerja sama dengan Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 643/Wns.	Kamis 9 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Tusi SHEK- Mendorong penguatan literasi di wilayah perbatasan	Rencana kegiatan Bersama di tahun 2026	



3.	Menghadiri Malam Penganugerahan Duta Bahasa Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.	Sabtu 11 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Melihat secara langsung pembinaan Balai Bahasa dalam literasi	Kegiatan berlangsung baik	
4.	Bertemu Walikota Jayapura dalam rangka Pembahasan Kongres Bahasa Daerah	Selasa 14 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi kegiatan kongres Bahasa daerah- Permohonan dukungan	Pemkot menerima dan siap mendukung kongres Bahasa daerah	
5.	Menghadiri Seminar Jurusan Hukum Universitas Cenderawasih dengan tema "Refleksi Otonomi Khusus Papua"	Jumat 17 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Anggota Menjadi narasumber- Sosialisasi BP3OKP	<ul style="list-style-type: none">- Antusiasme Mahasiswa sangat baik dalam memberikan pertanyaan tentang OTSUS PAPUA	



6.	Mendampingi Anggota BPP/BP3OKP dalam kegiatan Dialog Papua 60 Menit dalam tema Arah baru papua, Mewujudkan Papua cerdas, sehat, produktif dan aman di TVRI Papua.	Rabu 22 April 2026	Bentuk sosialisasi BP3OKP terhadap TuSi dan bagaimana melihat lalu memberikan tanggapan tentang kondisi Papua sekarang	Kegiatan berlangsung baik dan akan direncanakan untuk dilakukan dialog terkait “ 5 TAHUN PERJALANAN OTSUS PAPUA”	
----	---	-----------------------	--	--	---



Rekomendasi Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP/BP3OKP Provinsi Papua



No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Rapat Pembahasan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 antara Anggota dan Pokja BPP/BP3OKP bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan bertempat di Gedung Sutan Takdir Alisyahbana, Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Surat Permohonan Dukungan dari Badan Bahasa ke 6 Gubernur se Tanah Papua
2.	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan di Papua serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua bekerja sama dengan Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 643/Wns.	Buat sebuah kegiatan peningkatan literasi Bersama di Wilayah perbatasan RI-PNG
3.	Menghadiri Malam Penganugerahan Duta Bahasa Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.	Tetap dilanjutkan dan di tingkatkan
4.	Bertemu Walikota Jayapura dalam rangka Pembahasan Kongres Bahasa Daerah	Penyampaian Surat resmi dari Badan Bahasa
5.	Menjadi Narasumber di Seminar Jurusan Hukum Universitas Cenderawasih dengan tema "Refleksi Otonomi Khusus Papua".	Lebih banyak kegiatan seperti ini atau menjadi narasumber pada kuliah umum agar memberikan wawasan bagi mahasiswa
6.	Mendampingi Anggota BPP/BP3OKP dalam kegiatan Dialog Papua 60 Menit dalam thema Arah baru papua, Mewujudkan Papua cerdas, sehat, produktif dan aman di TVRI Papua.	Koordinasi dengan sekretariat untuk mempersiapkan rencana kegiatan Publikasi/Dokumentasi yang lebih masive



Kelompok Kerja (POKJA) Papua Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committe Indonesia (NPC)	Senin 13 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Komite Paralimpik Nasional (NPC) Papua, khususnya terkait pendanaan, fasilitas, dan dukungan pemerintah daerah.• Mendorong peningkatan perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas sebagai bagian dari pembangunan manusia Papua.• Memperkuat peran BPP sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator koordinasi lintas sektor dalam mendukung olahraga disabilitas.• Mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam kebijakan Otsus, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi berbagai permasalahan utama, yaitu minimnya dukungan anggaran, birokrasi yang berbelit, kurangnya apresiasi terhadap atlet, keterbatasan infrastruktur, serta adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.• Ditemukan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap NPC masih belum optimal dan belum berkeadilan dibandingkan cabang olahraga lainnya.• Disepakati perlunya pemisahan penanganan isu pendidikan (SLB) dan keolahragaan (NPC) agar lebih fokus dan tepat sasaran.• Diusulkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai forum strategis untuk membahas solusi kebijakan, pendanaan, dan penguatan kelembagaan NPC.• BPP berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut permasalahan.	



			kesejahteraan sosial.		
2.	<p>1. Pembahasan substansi materi narasumber</p> <p>2. Sinkronisasi program BPP dan BPJS Kesehatan (Program JKN di Papua</p> <p>3. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan BPJS tema "Transssformasi dan Kolaborasi Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta dan Akses Layanan Berkelanjutan.</p>	Rabu 15 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Mensinkronkan program BPP dengan BPJS Kesehatan Cabang, khususnya pelaksanaan Program JKN di Papua. Menyelaraskan substansi materi kegiatan serta memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Mendorong integrasi kebijakan dan percepatan program prioritas kesehatan berbasis data yang akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Disepakati perlunya transformasi pendekatan dari data ke aksi berbasis data akurat. Ditegaskan bahwa PJKP 2025–2029 menjadi instrumen utama integrasi lintas sektor. Teridentifikasi permasalahan utama: data tidak akurat, akses wilayah sulit, beban kader tinggi, dan lemahnya integrasi OPD. Menguatnya peran BPP sebagai pengarah kebijakan, pengendali program, integrator lintas sektor, dan akselerator program prioritas. Disepakati langkah strategis: konsolidasi data, penguatan tata kelola, percepatan intervensi lapangan, reformulasi Otsus, serta penguatan monitoring berbasis outcome 	
3.	Menjadi Narasumber dalam kegiatan BPJS Cabang Jayapura : tema "Transformasi dan Kolaborasi, Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta, dan Akses Layanan Kesehatan Berkelanjutan",	Jumat 17 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri kegiatan BPJS Kesehatan Cabang dalam rangka mendukung pelaksanaan Program JKN di Papua. Memperoleh informasi dan pemahaman terkait transformasi dan kolaborasi kepesertaan JKN. 	<ul style="list-style-type: none"> Diperolehnya gambaran mengenai arah kebijakan dan strategi penguatan kepesertaan JKN di Papua. Teridentifikasinya pentingnya peran pemerintah daerah, kemandirian peserta, serta peningkatan akses layanan kesehatan. 	



4.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	Kamis 30 April 2026	<ul style="list-style-type: none">• Menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027.• Memperoleh informasi terkait arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan perencanaan program Otsus di Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Diperolehnya gambaran mengenai prioritas pembangunan daerah dan fokus program Otsus Tahun 2027.• Teridentifikasinya kebutuhan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan Otsus.	
----	---	------------------------	---	--	--



Rekomendasi Kelompok Kerja (POKJA) Papua Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran yang adil dan berkelanjutan bagi pembinaan olahraga disabilitas melalui mekanisme hibah yang transparan.• Menyederhanakan mekanisme birokrasi pengajuan anggaran agar tidak menghambat operasional NPC.• Memastikan penyediaan fasilitas olahraga yang layak dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.• Mendorong pemberian apresiasi dan penghargaan kepada atlet disabilitas yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.• Mendukung pelaksanaan Muswil NPC sebagai forum resmi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat dan terintegrasi lintas sektor.• Mengintegrasikan isu disabilitas dalam kebijakan Otsus, termasuk pada sektor pendidikan (penambahan SLB), kesehatan, dan sosial.• BPP perlu melakukan koordinasi dan penyampaian rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) guna memastikan adanya tindak lanjut konkret.
2.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan substansi materi narasumber2. Sinkronisasi program BPP dan BPJS Kesehatan (Program JKN di Papua3. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan BPJS tema “Transformasi dan Kolaborasi Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta dan Akses Layanan Berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan perbaikan dan integrasi data (by name by address) sebagai dasar pengambilan kebijakan.• Mengoptimalkan sinergi lintas OPD dan integrasi program (Otsus, DAK, dan program nasional).• Memperkuat pelaksanaan program prioritas (MBG, stunting, Bangga Kencana) berbasis keluarga dan wilayah adat.• Mendorong intervensi langsung di lapangan, khususnya pada wilayah dengan akses sulit dan angka stunting tinggi.• Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome melalui dashboard terintegrasi.• Mengarahkan pemanfaatan dana Otsus agar lebih berdampak langsung pada keluarga OAP.
3.	Mengikuti kegiatan BPJS Cabang Jayapura : tema “Transformasi dan Kolaborasi, Kepesertaan JKN di Papua: Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kemandirian Peserta, dan Akses Layanan Kesehatan Berkelanjutan”,	<ul style="list-style-type: none">• Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.• Mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.• Mendukung upaya perluasan kepesertaan JKN secara berkelanjutan.



4.	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong sinkronisasi perencanaan RKPD dengan program Otsus agar lebih tepat sasaran.• Memperkuat koordinasi antar OPD dan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan program.• Mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
----	---	--

Pokja Papua Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua pada bulan April 2026 telah menjalankan fungsi pengawalan, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Otonomi Khusus, khususnya pada sektor kesehatan dan pembangunan manusia. Melalui berbagai forum koordinasi dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya

Pokja Papua Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang memerlukan percepatan penanganan, antara lain peningkatan ketepatan sasaran penggunaan dana Otsus, penguatan integrasi data lintas sektor, serta perluasan akses layanan kesehatan yang merata, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pokja juga terus mendorong transformasi pendekatan pembangunan dari administratif menjadi berbasis data, berbasis keluarga, dan berorientasi pada dampak nyata di lapangan.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan di lapangan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, antara lain tingkat komitmen dan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan akses wilayah Papua, belum optimalnya data lintas instansi, keterbatasan tenaga kesehatan, serta tantangan koordinasi lintas sektor dan pandangan penerimaan masyarakat.


Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja Papua Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua akan terus memperkuat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program Otsus, mengoptimalkan pemanfaatan dana agar tepat sasaran, mempercepat intervensi di wilayah prioritas, serta meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, guna memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Rencana Kegiatan Fokus Bulan Mei 2026



- Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam pelaksanaan program agar lebih kontekstual dan efektif.
- Melakukan rapat teknis dengan OPD (Dukcapil, Dinkes, Sosial, Bappeda) untuk verifikasi dan integrasi data sebagai dasar intervensi program prioritas.
- Melakukan sinkronisasi program bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk memastikan integrasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
- Mengidentifikasi dan menetapkan wilayah prioritas (stunting tinggi, akses sulit), serta mendorong intervensi langsung melalui layanan kesehatan dan program berbasis keluarga.
- Melakukan peninjauan langsung ke fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu) di wilayah prioritas untuk memastikan kondisi riil dan percepatan intervensi.



Kelompok Kerja (POKJA) Papua Produktif BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1	Pengembangan Layanan Leuungan di daerah, Dukungan terhadap pemerintahan daerah dan Peluang Kerja sama bersama Bank Negara Indonesia	Senin 13 April 2026	Tujuan rapat koordinasi ini adalah membahas empat Program kerja utama Papua Produktif, serta bagaimana pihak Perbankan dapat bekerjasama.	Pembahasan terkait empat program kerja yaitu <i>cold storage</i> di Jayapura, peternakan unggas di Timika, peremajaan sawit di Keerom, serta pengembangan Kab. Biak sebagai hub ikan global. Sebagai tindak lanjut bersama akan disusun naskah kerjasama layanan perbankan yang berfokus pada literasi keuangan dan edukasi bagi Gapoktan sektor unggas, nelayan, dan sawit.	
2	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPC)	Senin 13 April 2026	Tujuan rapat ini adalah menyelesaikan permasalahan tidak tepat anggaran dari Pemerintah kepada NPC.	Ditemukan beberapa tantangan yaitu, birokrasi rumit, kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah, serta minimnya dukungan dana yang mengakibatkan infrastruktur tidak memadai serta juga NPC memiliki utang kegiatan sebelumnya.	



3	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga dalam Menyikapi Dinamika Sosial dan Kepercayaan Publik di Papua. BPP bersama MRP, DPRP dan Kesbangpol.	Rabu 15 April 2026	Memahami kerja masing-masing badan untuk dapat berkoordinasi sehingga tercipta Kerjasama yang menguntungkan bagi Rakyat dan Tanah Papua.	Hasil bersama yang dicapai ialah, BPP menegaskan mandat SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), kemudian MRP mendesain kerangka dan keberpihakan afirmatif dengan finishing regulasi dari DPR serta penilaian dampak oleh kesbangpol.	
4	Menghadiri Musyawarah Daerah I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Tahun 2026	Senin 20 April 2026	Kegiatan Musda HNSI bertujuan untuk mengembangkan sector perikanan di Papua.	Pelaksanaan Musda I HNSI Papua berhasil menetapkan visi besar untuk modernisasi, SDM, dan permodalan, serta didukung oleh sinergi kuat antar pemangku kepentingan. Langkah krusial selanjutnya adalah memastikan legalitas pengurus terpilih melalui pelantikan resmi.	
5	Sosialisasi Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat	22 April 2026	Mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat di Keerom.	Pihak Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemda Keerom, Pihak Perbankan(BRI-BPD PAPUA) serta ATR/BPN, membantu proses penyelesaian tanah rakyat, HGU serta beberapa perijinan lain yang mendukung program PSR bagi APKASINDO secara umum serta rakyat Keerom secara khusus.	



6	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	Kamis 30 April 2026			
---	---	------------------------	--	--	--



Rekomendasi Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Papua Produktif BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1	Pengembangan Layanan Leuangan di daerah, Dukungan terhadap pemerintahan daerah dan Peluang Kerja sama bersama Bank Negara Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan tentang literasi Keuangan perlu dilakukan oleh pihak terkait, agar nasabah(Anggota Gapoktan) lebih melek keuangan sehingga semua pihak tidak dirugikan.
2	Diskusi dana otsus yang tidak tepat sasaran bagi disabilitas bersama Nasional Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	<ul style="list-style-type: none">• Pisahkan isu tata Kelola (SLB) oleh dinas pendidikan serta isu keolahragaan, yang ditangani langsung oleh NPC.• Melakukan Musyawarah Olahraga untuk evaluasi program-solusi, anggaran, perluas fokus
3	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga dalam Menyikapi Dinamika Sosial dan Kepercayaan Publik di Papua. BPP bersama MRP, DPRP dan Kesbangpol.	<ul style="list-style-type: none">• Rumuskan strategi komunikasi publik terpadu BPP–DPRP–MRP (juru bicara, pesan kunci, kanal, SOP krisis) untuk meredam blunder dan narasi pembubaran.• Formalkan struktur koordinasi regulasi lintas lembaga (alur usulan, tenggat, PIC) untuk mencegah tumpang tindih; tetapkan peran MRP dalam inisiatif naskah vs advokasi.
4	Menghadiri Musyawarah Daerah I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none">• Badan Pengurus baru wajib terus berkoordinasi dengan nelayan agar memiliki data lengkap baik kemajuan serta permasalahan yang dapat diberikan kepada pemerintah. Data ini menjadi acuan pengembangan sector kelautan.
5	Sosialisasi Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Semua pihak terkait (ATR/BPN, TNI/POLRI, Pemda Prov.Papua – Kab. Keerom, Perbankan) wajib menyelesaikan setiap sel masalah yang menghambat program ini.
6	Menghadiri Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2027	<ul style="list-style-type: none">•

KESELURUHAN KESIMPULAN KEGIATAN POKJA PAPUA PRODUKTIF DIBULAN APRIL

- Edukasi terkait literasi keuangan kepada pelaku usaha perlu dilakukan agar penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran.
- Pihak NPC kab. Jayapura membagi isu Pendidikan dan Olahraga sehingga lebih meringankan beban anggaran badan.
- Perumusan strategi komunikasi public terpadu serta formalisasi struktur koordinasi regulasi lintas Lembaga akan memberikan dampak positif masing-masing Lembaga, terlebih kepada Rakyat Papua.
- Kemajuan sector perikanan dapat terjadi melalui kerjasama dan koordinasi dari Lembaga (HNSI) terkait dan juga pihak Nelayan di Papua bahkan Indonesia.
- Peremajaan Sawit Rakyat dapat segera dilakukan setelah semua pihak terkait memiliki kesepahaman bersama agar dapat merampungkan segala kendala yang berkaitan dengan PSR di Kab. Keerom, Papua.



Kesimpulan

Pelaksanaan berbagai kegiatan strategis BP3OKP Provinsi Papua sepanjang bulan April 2026 mencerminkan penguatan koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan di Papua. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi program Otonomi Khusus Papua, khususnya pada empat klaster utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam.

Pelaksanaan rapat, seminar, audiensi, hingga forum koordinasi menunjukkan adanya upaya nyata dalam:

- Mensinergikan dan mengkolaborasikan tugas serta fungsi antar lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- Menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk isu strategis seperti pengelolaan dana Otsus, sengketa tanah adat, dan keberlangsungan lembaga representatif di Papua.
- Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, serta kegiatan edukatif lainnya.
- Mengoptimalkan pelayanan publik melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti BPJS Kesehatan dalam rangka peningkatan kepesertaan dan akses layanan JKN di Papua.
- Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui forum perencanaan seperti Musrenbang RKPD dan Otsus.

Rekomendasi

1. Penguatan Peran Koordinasi dan Sinkronisasi BP3OKP
2. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus
3. Peningkatan Sinergi Implementasi Empat Klaster Prioritas (POKJA Papua Sehat, Cerdasm Produktif dan POLHUKAM)
4. Penguatan Fasilitasi dan Mediasi Isu Strategis Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
6. Penguatan Basis Data dan Informasi Otonomi Khusus



Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua bulan April 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program ke depan.

Diharapkan melalui penguatan koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dapat semakin optimal dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Pada akhirnya, laporan ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan bermartabat, menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.